

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Daerah

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapat daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diusahakan untuk membiayai pengeluaran daerah adalah PAD, dimana potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Definisi dari PAD adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lainnya yang sah (Halim, 2001). Menurut Djaenuri (2012) PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djaenuri, 2012).

Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Dalam perspektif otonomi daerah, ini menjadi sumber keuangan yang paling utama, selain jenis-jenis penerimaan daerah lainnya yang merupakan penjabaran dari UU No. 25 Tahun 1999. Besar kecilnya PAD akan sangat menentukan kemampuan daerah untuk membiayai segala urusan rumah tangga dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan setiap tahun (Djaenuri, 2012).

2.1.1.2. Komponen-komponen Pendapatan Daerah

Komponen-komponen Pendapatan Daerah adalah (Djaenuri, 2012; Bastian, 2001):

- a. Hasil pajak daerah. jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- b. Hasil retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga golongan retribusi daerah yaitu: untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau

bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah daerah (Bastian, 2001).

- d. Lain-lain PAD yang sah. Komponen yang tergolong dalam jenis pendapatan ini antara lain pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya, dan lain-lain.

2.1.2. Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Menurut Sunaryo (2013) wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata, seperti untuk berekreasi, berbisnis maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang lain. Menurut Spilane (Saputro, 2015) wisatawan adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanannya. Menurut Dimiyati (2004) wisatawan, menurut asal negara dari mana mereka datang, dapat dibedakan menjadi wisatawan asing atau mancanegara (wisman) dan wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik (wisdom). Organisasi Wisata Dunia (WTO) menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Menurut pandangan psikologi, wisata adalah sebuah sarana memanfaatkan waktu luang

untuk menghilangkan tekanan kejiwaan akibat pekerjaan yang melelahkan dan kejenuhan (Dimiyati, 2004).

Menurut Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut jumlah wisatawan hasil dari total keseluruhan orang yang bukan penduduk asli yang datang untuk melakukan perjalanan pendek. Adapun menurut Krapf & Hunziker (Udayantini, dkk., 2015), seorang pakar pariwisata meyakini bahwa jumlah wisatawan adalah munculnya serangkaian hubungan dari sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh sejumlah orang yang bukan penduduk asli dengan alasan untuk mencari kesenangan. Berdasarkan seluruh definisinya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan adalah total keseluruhan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang berkunjung atau datang kesuatu tempat yang bukan daerah tempat tinggalnya dengan tujuan untuk berlibur. Menurut Soekadijo (2001) jumlah wisatawan adalah sejumlah orang yang mengadakan perjalanan dan pergi kesuatu tempat yang akan di datangnya tanpa menetap di tempat tersebut, atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya (Soekadijo, 2001).

Adapun ilmu sosiologi menilai pariwisata sebagai rangkaian hubungan yang dijalin oleh pelancong yang bermukim sementara di suatu tempat dengan penduduk lokal. Krapf Hunziker, seorang pakar pariwisata meyakini bahwa wisata adalah munculnya serangkaian hubungan dari sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh seorang yang bukan penduduk asli. Berdasarkan seluruh definisinya, pariwisata adalah fenomena yang terus berkembang. Lebih dari itu, industri ini telah menyelamatkan sejumlah negara dari krisis, dan memarakkan pertumbuhan ekonominya.

Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan (Karyono,

1997):

- a. Wisatawan lokal (*local tourist*), yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri.
- b. Wisatawan mancanegara (*international tourist*), yaitu wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang berasal dari luar negeri.
- c. *Holiday tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur.
- d. *Business tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi.
- e. *Common interest tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak keluarga atau untuk berobat dan lain-lain.
- f. *Individual tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara sendiri-sendiri.
- g. *Group tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara bersama-sama atau berkelompok.

Kategori perjalanan seorang tamu (*visitor*) dapat dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu (Sunaryo, 2013):

- a. Tamu yang di dalam perjalanannya menginap atau tinggal lebih dari 24 jam di penginapan komersial yang disediakan di daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Kategori yang menginap disebut sebagai wisatawan (*tourist*).
- b. Tamu yang di dalam perjalanannya mempunyai lama tinggal kurang dari 24 jam atau tidak menginap di penginapan komersial yang ada di daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Kategori tamu yang tidak menginap disebut sebagai pelancong.

2.1.3. Jumlah Hotel

Hotel adalah tempat yang disediakan bagi para wisatawan untuk menginap selama mereka berkunjung atau tempat dalam melakukan kegiatan wisata. Disamping itu, sebelum melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan informasi mengenai daerah yang akan dituju beserta fasilitas-fasilitasnya. Hotel merupakan sarana akomodasi utama yang ingin diketahui oleh wisatawan sebelum melakukan suatu perjalanan. Oleh karena itu, keberadaan hotel adalah mutlak diperlukan. Dengan meningkatnya jumlah hotel dari tahun ke tahun diharapkan juga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik banyak investor untuk menanamkan modal, khususnya untuk sektor perhotelan. Upaya menarik investasi juga dapat dilakukan dengan memberikan berbagai kemudahan prosedur dan mengurangi birokrasi (Tarmoezi, 2000).

Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan, menurut Tarmoezi (Tarmoezi,

2000), dari hotel dapat dibedakan menjadi:

- a. *Small Hotel*. Kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar.
- b. *Medium Hotel*. Jumlah kamar yang disediakan antara 28-299 kamar.
- c. *Large Hotel*. Jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.

2.1.4. PDRB

2.1.4.1. Pengertian PDRB

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya

menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian) (Todaro, 2003). Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata.

Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk warga negara dalam negeri yang ada di wilayah suatu daerah. Data agregat PDRB disajikan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar dan atas harga berlaku. Pada penyajian atas dasar harga konstan, semua agregat dinilai atas harga tetap yang terjadi pada tahun dasar, sehingga perkembangan agregat pendapatan semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil-nya, bukan oleh kenaikan harga. Pada penyajian atas harga berlaku, semua agregat dinilai atas dasar harga pada tahun yang bersangkutan, baik pada saat menilai produksi dan biaya maupun komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB (Todaro, 2003).

2.1.4.2. Teori PDRB

Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi *Agregat Demand* (AD) dan atau sisi *Agregat Suplay* (AS). Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1, titik perpotongan antara kurva AD dengan kurva AS adalah titik keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) yang menghasilkan suatu jumlah output agregat (PDRB) tertentu dengan tingkat umum tertentu. Output agregat yang dihasilkan di dalam suatu ekonomi (atau negara) selanjutnya membentuk PN. Apabila pada periode awal ($t = 0$) output adalah Y_0 , maka yang dimaksud dengan

Pertumbuhan ekonomi adalah apabila pada periode berikutnya output = Y_1 (dimana $Y_1 > Y_0$). Melalui analisis gambar bisa dilihat bahwa pertumbuhan tersebut bisa disebabkan oleh pergeseran kurva penawaran (AS_1) bagian A atau pergeseran kurva permintaan (AD_1) bagian B (Tambunan, 2001).



(PN), yang terdiri dari permintaan masyarakat (konsumer), perusahaan, dan pemerintah meningkat. Sisi AD (penggunaan PDRB) terdiri dari empat komponen, yakni konsumsi rumah tangga (C), inflasi bruto (pembentukan modal tetap dan perubahan stok) dari sektor swasta dan pemerintah (I_b), konsumsi/pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto, yaitu ekspor barang dan jasa (X) minus impor barang dan jasa (M) (Tambunan, 2001).

Ada dua aliran pemikiran (teori) mengenai pertumbuhan ekonomi di lihat dari sisi AS atau produksi, yakni teori neo-klasik dan teori moderen. Dalam kelompok teori neo-klasik, faktor-faktor produksi yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah jumlah tenaga kerja dan kapital (modal). Kapital bisa dalam bentuk *finance* atau barang modal. Penambahan jumlah tenaga kerja dan kapital, dengan faktor-faktor lain seperti misalnya; tingkat produktivitas dari masing-masing faktor produksi tersebut atau secara keseluruhan tetap (tidak berubah), menambah output yang dihasilkan. Persentase

pertumbuhan output lebih besar (*increasing return to scale*), lebih kecil (*decreasing return to scale*), atau sama (*constant return to scale*) dibandingkan persentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut (Tambunan, 2001).

Dalam kelompok teori neo-klasik, peranan teknologi terhadap pertumbuhan output tidak mendapat perhatian secara *explicit*, walaupun pada Tahun 1950-an dan 1960-an sudah mulai ada pembahasan mengenai dampak positif daripada perubahan teknologi. Kelompok teori neo-klasik lebih memusatkan perhatian terhadap efek positif dari akumulasi kapital (investasi) terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai suatu kasus, pengalaman dari kelompok *newly industrialized countries* (NICs) seperti Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura memang menunjukkan kontribusi kapital per pekerja 90 persen, sedangkan *the residual*, yang di dalam fungsi produksi *Cobb Douglas* dianggap sebagai efek dari pertumbuhan produktivitas dari faktor-faktor produksi secara total, atau dari progres teknologi, hanya menyumbang antara 10-50 persen (Tambunan, 2001).

Dalam kelompok teori moderen, faktor-faktor produksi dianggap sama krusialnya, tidak hanya tenaga kerja dan modal, tetapi juga perubahan teknologi (yang terkandung di dalam barang modal), energi, kewirausahaan, bahan baku, dan material. Selain itu faktor-faktor yang lain oleh teori-teori modern juga dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum, serta peraturan (*the true of law*), stabilitas politik, kebijakan pemerintah (yang antara lain dicerminkan dari pengeluaran pemerintah), birokrasi, dan dasar tukar internasional (*term of trade*). Pentingnya

faktor-faktor ini terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kasus-kasus negara di Afrika, terutama Sub-Sahara Afrika yang pembangunan ekonominya berhenti. Menurut studi-studi yang ada, terhentinya pembangunan ekonomi negara-negara tersebut disebabkan antara lain oleh kualitas SDM-nya yang sangat rendah, politik yang tidak stabil, defisit keuangan pemerintah, dan keterbatasan infrastruktur (Tambunan, 2001).

Pemikiran kelompok teori moderen tersebut menunjukkan ada sejumlah perbedaan yang mendasar dengan kelompok teori neo-klasik. Di antaranya adalah yang mencakup tenaga kerja, kapital (barang modal), dan kewirausahaan. Dalam hal tenaga kerja, dalam kelompok teori moderen aspek kualitasnya menjadi sangat penting dibanding aspek kuantitasnya. Aspek kualitas tenaga kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan tetapi kondisi kesehatan menjadi dua variabel bebas yang penting di dalam analisis empiris dengan pendekatan ekonometris mengenai pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pendidikan biasanya diukur dengan persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi terhadap jumlah tenaga kerja, atau penduduk yang terdaftar dalam suatu tingkat pendidikan tertentu, misalnya pendidikan dasar (*primary school enrollment*). Kesehatan umumnya diukur dengan tingkat harapan hidup (*life expectancy*). Demikiannya juga halnya dengan kapital, kualitasnya (yang mencerminkan progres teknologi) lebih penting daripada kuantitas (akumulasi kapital), juga kewirausahaan; termasuk kemampuan seseorang untuk melakukan inovasi, merupakan salah satu faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.3. Teori Model PDRB

Teori pertumbuhan neo-klasik ini didasarkan pada fungsi produksi *Cobb-Douglas*. Selanjutnya fungsi produksi *Cobb-Douglas* dikembangkan dengan

menambah dua faktor faktor produksi lain, yakni input atau material produksi (M) dan energi (E). Dengan empat jenis faktor produksi tersebut, secara sederhana fungsi produksi atau model pertumbuhan ekonomi bisa digambarkan dalam suatu fungsi sederhana sebagai berikut :

$$Y = F (K, L, M, E)$$

Model Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada teori pertumbuhan neo-klasik memiliki suatu kelemahan serius. Model tersebut tidak bisa menerangkan kenapa di banyak negara di dunia pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan berdasarkan model ini. Dalam model pertumbuhan ini, teknologi dan ilmu pengetahuan di anggap konstan atau tidak (kurang) penting (dianggap suatu koefisien yang konstan), sehingga produktivitas tenaga kerja dan kapital tidak bisa ditingkatkan (Tambunan, 2001).

Dengan alasan kelemahan model pertumbuhan neo-klasik seperti yang dibahas di atas, maka sebagai alternatif muncul model Pertumbuhan ekonomi moderen atau *endogenous growth model* yang memasuki aspek-aspek endogenitas dan eksternalitas di dalam proses pembangunan ekonomi. Sifat keberadaan teknologi, manusia, dan ilmu pengetahuan merupakan faktor produksi yang dinamis dan tidak eksogen.

Endogenous growth model juga sangat relevan untuk menganalisis laju serta pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dampak dari progres teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas SDM terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri semakin tampak jelas saat ini di bandingkan dengan 30 tahun yang lalu.

Model pertumbuhan Harrold-Domar adalah suatu relasi jangka pendek antara peningkatan investasi (pembentukan kapital) dan pertumbuhan ekonomi. Model ini adalah suatu modifikasi yang di dasari pada model-model pertumbuhan

masing-masing dari Harrold dan Domar. Model Domar lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi (Tambunan, 2001).

2.1.4.4. Metode Penghitungan PDRB

a. Metode Produksi

PDRB dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor produktif dalam suatu negara selama suatu periode tertentu. Di Indonesia, periode waktu tersebut adalah satu tahun kalender, dan sektor-sektor produktif dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu : sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan galian, sektor listrik, air, gas, sektor bangunan, sektor transportasi dan komunikasi, sektor perdagangan, sektor bank dan lembaga keuangan, sektor sewa rumah, sektor pertanahan, dan sektor jasa-jasa lainnya (Arsyad, 2004).

Jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan sektor-sektor tersebut selama tahun fiskal itulah yang disebut PDRB. Penghitungan PDRB juga dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah (*value added*) yang diciptakan. Cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penghitungan berganda (*multiple counting*). Oleh karena itu metode produksi ini dikenal dengan model nilai tambah, di mana barang-barang dan jasa-jasa tersebut haruslah dihitung hanya satu kali, karena dalam realitanya hampir semua produk mengalami serentetan tahapan produksi.

Upaya untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda yang mungkin timbul karena adanya pembelian dan penjualan komponen beberapa kali, maka PDRB hanya memasukkan nilai pasar barang akhir saja dan mengabaikan barang antara berupa komponen-komponen atau barang-barang yang akan di proses lebih lanjut. Barang akhir merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang langsung dikonsumsi masyarakat dan tidak diproses lebih lanjut atau dijual lagi.

Adapun barang antara merupakan barang yang dibeli untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Nilai penjualan barang-barang akhir saja yang dimasukkan dalam PDRB, karena sudah termasuk semua nilai barang antara (Arsyad, 2004).

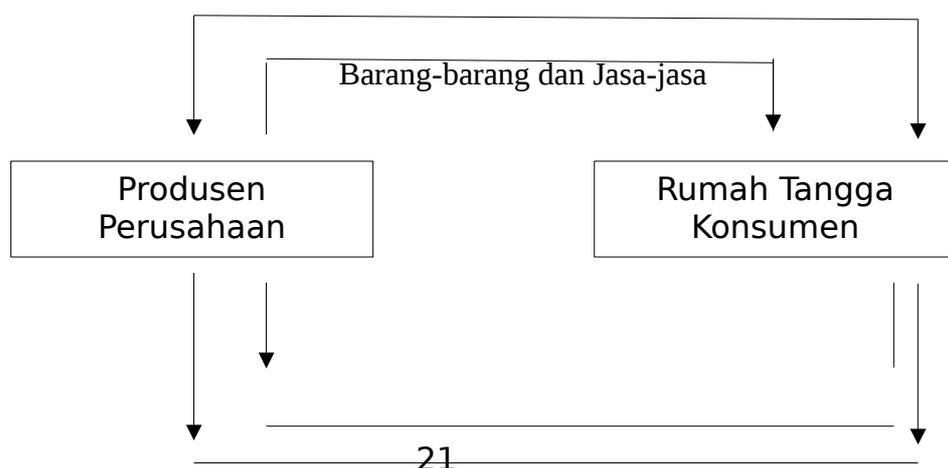
b. Metode Pendapatan

Menurut metode ini, PDRB dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat dan mendapatkan balas jasa, maka balas jasa tersebut kembali pada seseorang atau masyarakat sebagai pendapatan.

Melalui model diagram aliran melingkar, dapat melihat bahwa penghitungan PDRB dengan metode pendapatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan aliran pengeluaran atau produk
2. Pendekatan aliran pendapatan atau biaya.

Berikut ini diagram aliran melingkar penghitungan PDRB:



Tenaga kerja, tanah, kapital, *enterprenuership*

Pemberian upah, sewa, bunga, dan keuntungan

Gambar 2. Diagram Aliran Melingkar

- - - ➔ Menunjukkan aliran uang berupa pengeluaran dan pendapatan
- ➔ Menunjukkan aliran barang-barang dan jasa-jasa dan faktor-faktor produksi. Sumber : Wijaya (1990).

Dua aliran seperti pada Gambar 2.2 merupakan aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan dan aliran produk berupa barang-barang dan jasa-jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Pada aliran bagian bawah ditemui aliran jasa produktif atau aliran faktor-faktor produksi yang mengalir dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan dan aliran pendapatan berupa upah, bunga, keuntungan dan lain-lain yang merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan yang mengalir dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Masing-masing aliran tersebut haruslah sama dan ini merupakan PDRB, dan penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan mengukur besarnya salah satu dari aliran tersebut.

c. Metode Pengeluaran

Penghitungan pendapatan nasional dengan cara ini yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Pendapatan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat akan dibelanjakan pada berbagai barang dan jasa atau ditabung pengeluaran konsumsi dengan metode ini dibagi ke dalam: (Wijaya, 1990).

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan perorangan yang meliputi pengeluaran untuk barang-barang konsumsi tahan lama, seperti ; rumah,

radio, TV, dan lain-lain serta untuk mengkonsumsi barang yang habis sekali pakai seperti ; makanan, rokok, dan lain-lain. Jasa-jasa yang habis sekali pakai, seperti ; konsultasi kesehatan ke dokter, tukang gunting rambut, dan lain-lain.

2. Pengeluaran konsumsi pemerintah (G), yang meliputi pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I dan Kota Madya atau Kabupaten Tingkat II, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa dari sektor perusahaan serta pembelian secara langsung sumber-sumber terutama Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi tidak termasuk pembayaran transfer oleh pemerintah, karena tidak berhubungan dengan kegiatan produksi sedang berjalan, tetapi hanya merupakan transfer pemerintah kepada perorangan atau rumah tangga tertentu.
3. Investasi atau pembentukan barang-barang modal (I), investasi di sini merupakan investasi secara riil dan bukan secara finansial. Ada peralatan produksi lainnya, infrastruktur, dan perubahan investasi atau persediaan barang-barang akhir.
4. Ekspor adalah penjualan produk domestik ke luar negeri sebagai implikasi dari hubungan perdagangan antar negara, jika perekonomian negara tersebut merupakan perekonomian terbuka.

2.1.4.5. Faktor-faktor Penentu PDRB

a. Faktor Internal

Lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional selama dua tahun terakhir belakangan ini lebih disebabkan oleh kondisi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri. Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat dikarenakan proses perbaikan fundamental ekonomi nasional tidak disertai kestabilan politik dan keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial, serta kepastian hukum

yang ditambah lagi dengan tidak adanya rasa aman membuat tingkat *country risk* Indonesia semakin tinggi (Tambunan, 2001).

b. Faktor Eksternal

Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau perekonomian dunia merupakan faktor eksternal yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekspor dan investasi asing di dalam negeri (Tambunan, 2001).

2.1.5. Inflasi

Inflasi sebagai suatu fenomena makro ekonomi sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh variabel-variabel ekonomi belaka, tetapi juga variabel sosial ekonomi politik. Hal ini karena adanya *the invisible hand* yang sifatnya sangat mudah berubah. Usaha untuk memahami dan menyelidiki tingkat inflasi di suatu negara diperlukan pemahaman tentang aspek-aspek mana yang dalam kenyataannya mempengaruhi tingkat inflasi, sehingga bisa memilih salah satu atau kombinasi teori yang ada. Dari banyak teori yang menjelaskan tentang inflasi, teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi yang dipelopori oleh Irving. Teori kuantitas menyoroti aspek moneter sebagai faktor yang mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya inflasi. Sebagai basis teorinya kelompok kuantitas bersandar pada hukum kuantitas uang dari Irving Fisher yang dapat dituliskan sebagai berikut (Tambunan, 2001):

$$MV = PT,$$

dimana $M = \overline{Money}$, $V = \overline{Velocity\ of\ Money}$, $P = \overline{Price}$, $T = \overline{volume\ transaksi}$.

Rumus tersebut digunakan untuk menerangkan tentang perilaku kenaikan harga atau P (*Price*). Berdasarkan rumus kuantitas apabila penawaran uang M (*money*)

bertambah n kali maka tingkat harga P juga akan naik n kali. Teori kuantitas berasumsi bahwa V (*Velocity of Money*) dan T (*Trade*) dalam konstan.

Teori tentang inflasi lainnya berasal dari John Maynard Keynes (Boediono, 1999). Teori ini menyatakan bahwa terjadinya inflasi adalah disebabkan oleh permintaan agregat, sedangkan permintaan agregat ini tidak hanya karena ekspansi Bank Sentral, namun dapat pula disebabkan oleh pengeluaran investasi baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang melebihi penerimaan (defisit anggaran belanja negara) dalam kondisi ekonomi *full employment*. Secara garis besarnya Keynes menyebutkan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori lain tentang inflasi adalah teori strukturalis, yang menjelaskan fenomena inflasi dalam jangka panjang (Boediono, 1999). Teori ini berkembang dari pengalaman negara-negara Amerika Latin. Menurut kelompok strukturalis inflasi di negara-negara berkembang disebabkan oleh kelemahan dalam struktur perekonomiannya. Kelemahan struktur ini karena diakibatkan oleh adanya ketegaran (*inflationary*) dari perekonomian negara-negara sedang berkembang.

Selain ketiga teori yang telah disebutkan di atas, ada beberapa teori yang membahas tentang inflasi, salah satunya adalah teori Paritas Daya Beli. Teori ini pertama kalinya dikemukakan oleh Gustav Casell Tahun 1922 yang mengandung dua pengertian, yaitu pengertian absolut dan pengertian relatif. Pengertian absolut mengatakan bahwa kurs keseimbangan diantara mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri merupakan nisbah antara harga absolut dalam negeri dan harga absolut luar negeri, sedangkan pengertian relatif menyatakan, bahwa prosentase perubahan kurs keseimbangan diantara mata uang dalam negeri dan mata uang

luar negeri merupakan nisbah antara prosentase perubahan harga dalam negeri dan prosentase perubahan harga luar negeri, sehingga prosentase perubahan kurs tersebut mencerminkan perbedaan tingkat inflasi diantara dua negara.

Beberapa hal yang perlu ditekankan dari teori paritas daya beli adalah, *pertama* masalah dasar dari Paritas Daya Beli, yakni proporsionalitas tingkat harga dan nilai tukar hanya terjadi, jika penyebab guncangan yang mengubah tingkat harga dan nilai tukar merupakan suatu guncangan moneter. *Kedua*, teori paritas daya beli tersebut tidak dapat kerja seketika, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dapat dikatakan bahwa teori tersebut menunjukkan hubungan keseimbangan jangka panjang antara nilai tukar dengan tingkat harga.

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum dan berlangsung terus menerus. Inflasi adalah disebabkan oleh permintaan agregat, sedangkan permintaan agregat ini tidak hanya karena ekspansi Bank Sentral, namun dapat pula disebabkan oleh pengeluaran investasi baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang melebihi penerimaan (defisit anggaran belanja negara) dalam kondisi ekonomi (Tambunan, 2001).

2.2. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Udayantini (2015) dengan judul “Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata, jumlah wisatawan terhadap pendapatan sektor pariwisata, tingkat hunian hotel terhadap pendapatan

sektor pariwisata, dan jumlah wisatawan terhadap tingkat hunian di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal. Subjek dalam penelitian ini adalah hotel, restoran, dan retribusi pariwisata lainnya, dan objeknya adalah jumlah wisatawan, tingkat hunian, dan pendapatan sektor pariwisata. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh dari jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata dengan sumbangan pengaruh sebesar 88,3%, (2) ada pengaruh positif dari jumlah wisatawan terhadap pendapatan sektor pariwisata dengan sumbangan pengaruh sebesar 63,5%, (3) ada pengaruh positif dari tingkat hunian hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata dengan sumbangan pengaruh sebesar 17,3%, dan, (4) ada pengaruh positif dari jumlah wisatawan terhadap tingkat hunian hotel di Kabupaten Buleleng dengan sumbangan pengaruh sebesar 05,1%.

Hasil penelitian Marta dan I Ketut (2014) dengan judul “Analisis Penerimaan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pariwisata di Kabupaten Badung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antara jumlah wisatawan mancanegara, kurs dollar AS, dan tingkat keamanan pada penerimaan produk domestik regional bruto sector pariwisata di Kabupaten Badung. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan periode pengamatan dari tahun 1998-2012. Hasil uji F menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara, kurs dollar AS, dan tingkat keamanan berpengaruh secara simultan pada penerimaan Produk Domestik Regional Bruto sektor

pariwisata di Kabupaten Badung. Hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara dan kurs dollar AS berpengaruh positif, sementara tingkat keamanan tidak berpengaruh pada penerimaan produk domestik regional bruto sektor pariwisata di Kabupaten Badung.

Hasil penelitian Putra (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Kepariwisataan terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, dan sarana pendukung pariwisata terhadap pendapatan daerah. Alat analisis menggunakan regresi linier. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berdampak positif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014. Jumlah objek wisata tidak berdampak signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014, sedangkan sarana pendukung pariwisata berdampak negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014.

Hasil penelitian Adam (2013) dengan judul “Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel”. Tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa kuat hubungan jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan (*time series*), atau runtut waktu selama tujuh tahun yaitu dari tahun 2005-2011. Data penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis

korelasi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah wisatawan dan jumlah hotel memiliki hubungan yang kuat terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado dan jumlah hotel sangat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado.

Hasil penelitian Sativa (2013) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi PAD di Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini di ditujukan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap PAD kabupaten/kota se-Provinsi DIY yang terdiri dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut dianalisis dengan menggunakan regresi linier data panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD. Tiga variabel lainnya, yaitu pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD, meskipun dengan tanda yang berbeda. Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif ; sedangkan inflasi menunjukkan pengaruh negatif . Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan PAD, maka pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi DIY perlu berupaya meningkatkan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan inflasi. Temuan lainnya adalah bahwa keempat variabel diketahui mempengaruhi PAD secara simultan.

Hasil penelitian Wulandari & Sigit (2016) dengan judul “Peran Sektor Pariwisata Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 1990-

2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, belanja modal, dan jumlah sarana angkutan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan tahun 1990-2014. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen dan jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, belanja modal, dan jumlah sarana angkutan sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan, dan BAPPEDA Kabupaten Tabanan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Penulis menggunakan Eviews untuk mengolah data. Analisis memberikan kesimpulan bahwa : jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, jumlah sarana angkutan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah hotel dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Hasil penelitian Ibrianti (2016) dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisata, Jumlah Objek Wisata, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Lingga Periode 2011-2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisata, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lingga. Tempat penelitian ini adalah di Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga. Sampel dalam penelitian ini adalah Sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah kunjungan wisata, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel serta pendapatan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lingga periode Tahun 2011 sampai dengan 2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu dengan metode Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan SPSS Versi 21 yang nantinya menggambarkan pengaruh jumlah kunjungan wisata, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lingga Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan nilai adjusted R-Square sebesar 41,5%. Artinya 41,5% pendapatan sektor pariwisata dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas Kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, serta jumlah objek wisata. Sedangkan sisanya 58,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Hasil penelitian Ikhsan (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan PDRB terhadap Pendapatan Retribusi di 5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (2001-2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan PDRB terhadap pendapatan retribusi di 5 kabupaten/kota daerah Istimewa Yogyakarta (2001-2014). Penelitian ini dilakukan pada kota/kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan antara lain adalah jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, PDRB perkapita, dan pendapatan retribusi kabupaten/kota di DIY. Selain itu data yang digunakan adalah data kurun waktu (time series) dari tahun 2001-2015 dan data deret lintang (*cross section*) sebanyak 5 kabupaten/kota di DIY yang menghasilkan 70 observasi. Hasil regresi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Jumlah Obyek Wisata tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Retribusi pada Kabupaten/Kota yang ada di DIY. Dibuktikan dengan nilai signifikansi Jumlah Obyek Wisata

sebesar $0,1106 > 0,05$. Jumlah Wisatawan Berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Retribusi pada Kabupaten/Kota yang ada di DIY. Dibuktikan dengan nilai signifikansi Jumlah Wisatawan sebesar $(-) 0,0135 < 0,05$. PDRB Berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Retribusi pada Kabupaten/Kota yang ada di DIY. Dibuktikan dengan nilai signifikansi PDRB sebesar $0,0000 > 0,05$.

Hasil penelitian Rozikin (2015) dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok. Objek dari penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok, jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok.

Hasil penelitian Handayani (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, dan Pendapatan Perkapita terhadap Retribusi Obyek Pariwisata di Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini dicapai dengan metode model analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan data *time*

series selama lima tahun (2007-2011) dan data *cross section* sebanyak 30 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Melalui model regresi tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Hasil analisis diketahui bahwa tingkat signifikan 0,003 untuk jumlah obyek wisata, signifikan 0,000 jumlah wisatawan dan signifikan 0,004 pendapatan perkapita dengan tingkat signifikan < 0,05, maka hipotesisnya diterima dan berpengaruh positif terhadap retribusi. Sedangkan tingkat hunian hotel dengan nilai signifikan 0,245, maka hipotesisnya ditolak, karena tingkat probabilitas > 0,05 terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di 30 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Hasil penelitian Kamila (2016) dengan judul “Pengaruh Sektor Pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Investasi Dan Jumlah Penduduk terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2014 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sektor pariwisata, produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat investasi, jumlah penduduk terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Eks Karesidenan Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun instansi-instansi terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Eks Karesidenan Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak tujuh daerah selama lima tahun. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji F, uji koefisien determinasi R², dan uji t. Berdasarkan hasil analisis data dapat

disimpulkan bahwa variabel sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Sedangkan variabel produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian pada variabel tingkat investasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian Rahma & Herniwati (2013) dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus. Alat untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Kudus (Y), hal ini dikarenakan nilai *t-statistic* sebesar 4,082 dengan probabilita sebesar 0,002 maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata. Sedangkan nilai *coefficient* menunjukkan angka sebesar 1252,128 sehingga setiap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 10 orang akan meningkatkan penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus sebesar 12.521,280 rupiah. Variabel jumlah obyek wisata (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Kudus (Y), hal ini dikarenakan nilai *t-statistic* sebesar 2,519

dengan probabilita sebesar 0,029 maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata. Sedangkan nilai *coefficient* menunjukkan angka sebesar 1,284 sehingga setiap peningkatan jumlah obyek wisata sebanyak 1 unit akan meningkatkan penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus sebesar 12.840.000 rupiah. Variabel Pendapatan Perkapita (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Kudus (Y), hal ini dikarenakan nilai *t-statistic* sebesar 2,660 dengan probabilita sebesar 0,022, maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata. Sedangkan nilai *coefficient* menunjukkan angka sebesar 53,918 sehingga setiap peningkatan Pendapatan Perkapita sebanyak 1 rupiah akan meningkatkan penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus sebesar 53.918 rupiah.

Hasil penelitian Tendean dkk., (2011) dengan judul “Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Melalui Pajak Hotel Sebagai *Intervening* Variabel”. Pengembangan sektor pariwisata secara terpadu merupakan peluang strategis yang dapat menguntungkan daerah terutama angkatan kerja produktif dan berkualitas dalam upaya peningkatan produktivitas sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penunjang PAD yang signifikan. Kota Manado merupakan pusat pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara beberapa sektor yang dapat di kembangkan yaitu sektor pariwisata. budaya dan kesenian merupakan bagian yang dapat di andalkan dari Kota Manado yang berkontribusi sangat besar terhadap sektor perdagangan dan perhotelan yang nantinya di harapkan dapat berimbas pada meningkatnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui

analisis jalur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap PAD, sehingga bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan PAD, jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap pajak hotel, sehingga bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan pajak hotel, jumlah wisatawan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap PAD melalui pajak hotel sebagai variabel *intervening*.

Hasil penelitian Suherlan (2016) dengan judul “Kontribusi Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, dan Pendapatan Per Kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat”. Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sektor pendongkrak ekonomi Jawa Barat yang sedang lesu dan dinilai dapat menjadi pendukung besar bagi pendapatan di Jawa Barat. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, besar kecilnya pajak hotel dan restoran, dan besar kecilnya retribusi obyek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kontribusi jumlah objek pariwisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar, dan pendapatan perkapita terhadap retribusi objek pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka

yang di nilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Data yang digunakan adalah data time series adalah data runtut waktu (*time series*) yang merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara beruntutan dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross-section*.

Hasil analisis bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) jumlah obyek wisata di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat cenderung tetap, kecuali pada tahun 2013, jumlah obyek wisata terjadi peningkatan diantaranya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bogor. Total Wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat (2009-2013) kecenderungannya relative tetap, kecuali pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah kunjungan yaitu di Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah peningkatan kunjungan wisatawan terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota, di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat. Peningkatan jumlah wisatawan tertinggi (hampir mencapai 6 juta wisatawan) terjadi pada Kabupaten Bandung tahun 2013 dan Kabupaten Subang tahun 2009. Jumlah Hotel dan Akomodasi lainnya di Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) relative tetap, dimana Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis (Pangandaran belum menjadi Kabupaten) memiliki Jumlah Hotel dan Akomodasi lainnya yang tertinggi. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013) relatif tetap, kecuali Kota Bandung selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya di Jawa Barat. Selama kurun waktu 5 tahun (2009-2013), Penerimaan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Jawa

Barat cenderung tetap. Peningkatan signifikan terjadi (PAD) Sektor Pariwisata terjadi di Kota Bogor. Sementara itu, Kota Bandung merupakan daerah yang PAD Sektor Pariwisata yang tertinggi di Jawa Barat.

Hasil uji pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, dan Pendapatan Per Kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat, menunjukkan beberapa hasil, diantaranya bahwa Jumlah Hotel dan Akomodasi lainnya tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sektor pariwisata. Sementara itu, Jumlah Wisatawan (JKW) terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sektor pariwisata. Sedangkan Jumlah Obyek Wisata (JOW) tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sector pariwisata. Sementara itu, Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap PAD sektor pariwisata.

Hasil penelitian Windayani & Made (2017) dengan judul “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pengeluaran Wisatawan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali’. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Pengaruh kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pengeluaran wisatawan terhadap penyerapan tenaga kerja, 2) Pengaruh kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, pengeluaran wisatawan dan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) Pengaruh tidak langsung kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel dan pengeluaran wisatawan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Obyek pada penelitian ini meliputi kunjungan

wisatawan, tingkat hunian hotel, pengeluaran wisatawan, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Observasi non partisipan dan wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur/path analisis dan uji sobel untuk menganalisis pengaruh tidak langsung melalui variable intervening. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa kunjungan Wisatawan dan pengeluaran wisatawan tidak berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali sedangkan tingkat hunian hotel berpengaruh langsung dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian Putri (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. (2) dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. (3) inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. (4) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan inflasi secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh*

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

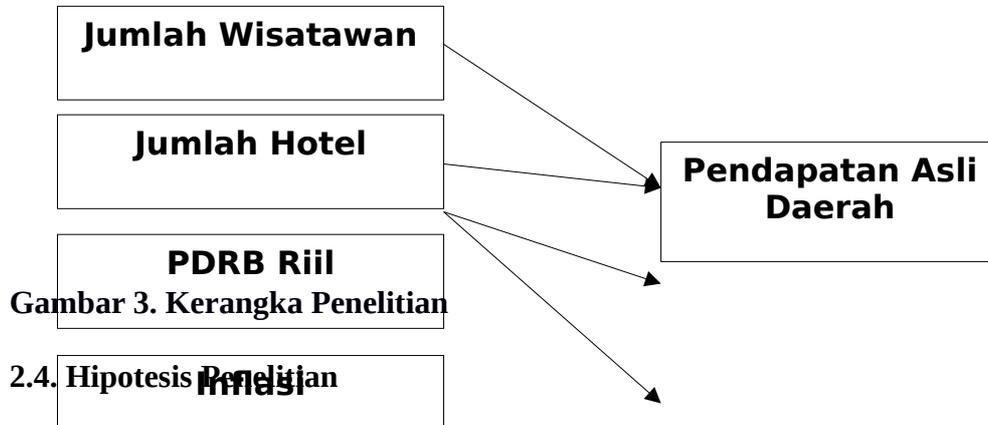
Hasil penelitian Yuniningsih (2005) dengan judul “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat”. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ciamis dalam rangka mengembangkan potensi obyek wisata pantai Pangandaran, (2) Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah informan dan dokumen di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan obyek wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis interaktif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran adalah dengan membangun berbagai fasilitas wisata, promosi lewat media massa, maupun pameran wisata. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran adalah adanya daya tarik yang dimiliki oleh pantai Pangandaran, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang menghambatnya adalah adanya faktor internal, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang, kurangnya kesadaran dari para pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat, terdapatnya lahan tidur, abrasi pesisir pantai, kurang tertibnya pedagang persaingan yang semakin ketat, krisis moneter, adanya pengaruh luar, kultur masyarakat yang kurang mendukung, kurangnya kesadaran wisatawan dan kurang sadarnya lembaga-lembaga swasta terhadap sarana dan prasarana kepariwisataan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku pengelola adalah dengan cara memindahkan para pedagang kaki lima, membangun pancang dan dermaga penahan abrasi, rehabilitasi dan penanaman pohon baru, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa pariwisata, dan memberikan Diklat kepegawaian kepariwisataan.

2.3. Kerangka Penelitian



2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- a. Diduga jumlah jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Provinsi DIY.
- b. Diduga jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Provinsi DIY.
- c. Diduga PDRB riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Provinsi DIY.
- d. Diduga inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Provinsi DIY.

